

**TESIS**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU ANAK YANG  
BERTINDAK SEBAGAI MUCIKARI PROSTITUSI ONLINE**

**Disusun dan Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum**



**Oleh :  
ALDI FERMANSYAH  
NIM: 201610380211003**

**DIREKTORAT PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG  
2018**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU ANAK YANG  
BERTINDAK SEBAGAI MUCIKARI PROSTITUSI ONLINE**

**ALDI FERMANSYAH  
201610380211003**

Telah disetujui

Pada hari/tanggal, **Senin/29 Oktober 2018**

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

**Dr. Tongat, S.H. M.Hum**

**Dr. Haris Tofly, S.H. MH**

Direktur  
Program Pascasarjana

Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Hukum



**Akhsaul Ham, Ph.D**

**Mokh Najih, S.H., M.H., Ph.D**

# TESIS

**ALDI FERMANSYAH**  
**201610380211003**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
pada hari/tanggal, **Senin / 29 Oktober 2018**  
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan  
memperoleh gelar Magister/Profesi di Program Pascasarjana  
Universitas Muhammadiyah Malang

## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

**Ketua / Penguji : Dr. Tongat**  
**Sekretaris / Penguji : Dr. Haris Tofly**  
**Penguji : Mokh. Najih, Ph.D**  
**Penguji : Dr. Fifik Wiryani**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : **ALDI FERMANSYAH**

NIM : **201610380211003**

Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. TESIS dengan judul : **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU ANAK YANG BERTINDAK SEBAGAI MUCIKARI PROSTITUSI ONLINE”** Adalah karya saya dan dalam naskah Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.
2. Apabila ternyata dalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur **PLAGIASI**, saya bersedia Tesis ini **DIGUGURKAN** dan **GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN**, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tesis ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan **HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF**.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 22 Oktober 2018

Yang menyatakan,



**ALDI FERMANSYAH**

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU ANAK YANG BERTINDAK SEBAGAI MUCIKARI PROSTITUSI ONLINE”**. Tesis ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sedalamdalamnya kepada berbagai pihak yang telah berperan besar bagi selesainya tugas/skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan ucapan hormat yang setinggi-tingginya kepada :

1. Ibunda Sri Mulya Ningsih., S.pd, Alm. Ayahanda Didik Sukaryadi., S.pd, dan Mbakku Eka Dian Kartika Trisna Ningsih., S.AP dan Istri Nina Hadiyanti. S.H., MH, begitu juga untuk semua keluarga yang telah memberikan dorongan semangat dan motifasi pada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Direktur Program Pascasarjana UMM Akhsanul In'am, mantan Direktur PPS UMM Dr Latipun, M.Kes, dan jajaran staff TU PPS UMM dan Kaprodi Magister Hukum Mokh Najih S.H., M.H., P.hD.
3. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Tongat, S.H. M.Hum selaku dosen pembimbing 1 dan Dr. Haris Tofly, S.H. MH selaku dosen pembimbing 2 yang penuh dengan



kesabaran sedikit meluangkan waktu dan tenaga serta pikiran dalam membimbing penulis, hingga terselesaikannya penulisan tugas akhir ini.

4. Segenap Bapak dan Ibu dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan ilmu bermanfaat bagi penulis.
5. Teman seperjuangan yang tak kenal surut akan semangat dan tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun penulis harapkan guna perbaikan dan penyempurnaan sehingga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi semua pihak.

***Wassalamualaikum Wr. Wb***

Malang, 17 Oktober 2018

Penulis

Aldi Fermansyah

## DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	iii
Abstraksi .....	v
Abstract .....	vi
Latar Belakang .....	1
Konsep/Pengertian Pertanggungjawaban Pidana .....	4
Syarat adanya Pertanggungjawaban Pidana .....	6
Konsep terhadap Pelaku .....	7
Pelaku dan Kualifikasinya .....	7
Konsep tentang Mucikari .....	9
Konsep/Pengertian Prostitusi.....	10
Prostitusi dalam Peraturan Perundang-Undangan .....	11
Konsep/Pengertian Prostitusi Online .....	12
Pengaturan Prostitusi Online dalam Peraturan Perundang-Undangan .....	13
Konsep/Pengertian Anak .....	14
Pengaturan tentang kriteria Sebagai Anak .....	15
Anak yang Bermasalah dengan Hukum .....	18
Metode Penelitian.....	21
Sumber Data Hukum.....	21
Hasil dan pembahasan .....	24
Kejahatan Prostitusi Online dalam Perspektif Hukum Pidana.....	22
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Anak yang Bertindak Sebagai Mucikari Prostitusi Online.....	27
Upaya Pembaharuan Hukum Pidana dalam Rangka Memaksimalkan Sanksi Pidana Menjerat Pelaku Anak yang Bertindak Sebagai Pelaku Mucikari Prostitusi Online .....	33

Kesimpulan .....	37
Saran .....	38
Daftar Pustaka.....	39





## **ABSTRAKSI**

**Nama : Aldi Fermansyah**  
**Nim : 201610380211003**  
**Judul : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Anak Yang Bertindak Sebagai Mucikari Prostitusi Online**

Penelitian ditujukan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku anak yang bertindak sebagai mucikari prostitusi online. Terdapat rumusan masalah terkait penelitian ini,; 1)Bagaimana pengaturan mengenai kejahatan prostitusi online dalam perspektif hokum pidana, 2)Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku anak yang bertindak sebagai mucikari prostitusi online, dan 3)Bagaimana upaya pembaharuan hukum pidana dalam rangka memaksimalkan sanksi pidana menjerat pelaku anak yang bertindak sebagai mucikari prostitusi online. Untuk mencapai tujuan maka peneletian dilakukan dengan menggunakan pendekatan secara konseptual dan dengan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif (normative law research) menggunakan studi normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji Undang-Undang. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan atau (statute approach), pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang di lakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang di tangani. Dalam hal ini penulis mengungkapkan bahwasannya sebaiknya dilakukan pengkajian dan pembahasan lebih mendalam lagi mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku, baik anak sebagai korban maupun sebagai pelaku. sehingga peraturan perundang-undangan dalam hukum pidana dapat lebih menjangkau kejahatan cyber berbasis prostitusi online

**Kata Kunci : Pertanggung jawaban, Pelaku. Prostitusi Online**

## ABSTRACT

**Name** : Aldi Fermansyah  
**Nim** : 201610380211003  
**Title** : Criminal Responsibilitis To Children Who Act As  
Mucikari Online Prostitution

Research to find out and analyze friendships made against perpetrators of child abuse who act as online prostitution pimps. Are there any formulation of the problems related to this research: 1) How is the regulation of online prostitution crime in the perspective of the convict law, 2) How is the accountability of opinions on children acting as online prostitution pimps, and 3) How to reform criminal law in Children who act as online prostitution pimps. To achieve the goal, research is carried out using a conceptual approach and with normative legal research methods. Normative legal research (normative legal research) uses normative studies in the form of legal behavior products, for example reviewing the Law. The approach used in this study is the statutory approach or approach, the interaction approach is an approach taken by examining all laws and regulations that are related to the legal issues being handled. In this case the author reveals that he is conducting a study and further discussion about accountability to people, both children as victims and as perpetrators. Licensing policies in law can be used based on online prostitution

**Keywords:** Responsibility, Actors, OnlineProstitution

## Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan komunikasi membawa perubahan baru dalam kehidupan masyarakat, tidak hanya memiliki sisi positif sebagai penunjang untuk memudahkan dalam melakukan aktifitas sehari-hari, akan tetapi juga berdampak negatif termasuk dibidang <sup>keasusilaan</sup> yang akhir-akhir ini marak terjadi seperti Prostitusi Online, penggunaan internet untuk tujuan tujuan seksual atau menggunakan komputer untuk setiap bentuk ekspresi atau kepuasan seksual (*Cybersex*).<sup>1</sup> Menurut Barda Nawawi Arief, pengertian computer-related crime sama dengan cybercrime.<sup>2</sup>

Dalam hal ini prostitusi online tidak semata merta dapat dilepaskan dari adanya pelaku dan korban.. Korban tindak pidana prostitusi atau semacamnya tidak hanya terbatas pada perempuan dewasa, juga tidak menutup kemungkinan anak-anak menjadi korban eksploitasi seksual komersial dengan bujuk dan paksa melakukan hubungan seksual, melalui perantara media sosial saat ini kebanyakan disalah gunakan mengekspos foto anak-anak telanjang untuk kepentingan seksual komersial, seperti chatting atau aktivitas online lainnya yang sengaja digunakan untuk menjajakan seks dengan anak-anak. Dan berikut ini merupakan salah satu pemberitaan dari media massa sebagai dampak negative dari fenomena kemajuan teknologi informasi globalisasi yang terjadi:

KN merupakan salah satu pelajar di Kota Palu, yang melakukan pekerjaan sebagai mucikari anak dibawah umur. Berdasarkan pengakuan KN ia melakukan pekerjaan tersebut disebabkan kebutuhan yang banyak, namun uang yang di berikan oleh orang tuanya tidak mencukupi kebutuhan hidupnya. Akibat dari ekonomi keluarganya tidak mampu memenuhi kebutuhannya, maka dari itu KN melakukan pekerjaan sebagai mucikari. Menurut KN pekerjaan ini tidak hanya menguntungkan,

---

<sup>1</sup> Barda Nawawi Arief. 2011. *Pornografi, Pornoaksi dan Cybersex- Cyberporn*. Pustaka Magister. Semarang. hal. 78

<sup>2</sup> Nurudin. 2014. *Pengantar Komunikasi Massa*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. hal 9

pekerjaan tersebut adalah profesi yang mudah dan menghasilkan uang yang cukup serta dapat memenuhi kebutuhannya. KN melakukan pekerjaan sebagai mucikari sejak kelas 2 SMA, KN mengenal pekerjaan sebagai mucikari dari Teman pergaulannya yang mengajaknya cukup dengan mencari Pelanggan dan menemani ke tempat penginapan untuk menunggu teman wanita pekerja seks komersial (PSK) nya. Dari pekerjaan mucikari KN mendapatkan 30% dari hasil yang di dapatkan pekerja seks komersial (PSK)nya. Tarif yang di berikan oleh KN berbeda-beda untuk persekali melakukan intim Rp500.000, untuk permalam tarifnya Rp1.000.000. Proses transaksi yang dilakukan KN melalui telpon maupun melalui blackberry masenger (BBM). KN di mintai pesanan pekerja seks komersial (PSK) lalu, KN bertemu di berbagai tempat sebelum melakukan tanda jadi contohnya: di kafe, tempat Karouke maupun di tempat hiburan malam lalu melakukan persetujuan.<sup>3</sup>

Eksplotasi Seksual Komersial Anak (ESKA) merupakan sebuah bentuk pelanggaran mendasar terhadap hak-hak anak yang bisa terjadi pada siapa saja dan dimana saja.<sup>4</sup> Hal ini tak lain kondisi kemiskinan di daerah asalnya, rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya informasi dan pengetahuan, dan masih rendahnya upaya perlindungan atas anak-anak, menyebabkan kondisi yang tidak menguntungkan bagi anak-anak.<sup>5</sup> Kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah, kondisi keluarga yang tidak mampu memberikan perlindungan kepada anak-anaknya, dan pergaulan bebas dalam hal merupakan beberapa faktor yang mendorong anak-anak masuk dalam dunia perdagangan anak, menjadi korban anak-anak yang dilacurkan.

*End Children Prostitution, Child Pornography, and the Trafficking of Children for Sexual Purposes International (ECPAT Internasional)*, dalam hal ini memberikan definisi bahwa eksploitasi seksual komersia anak adalah sebuah

---

<sup>3</sup> Jurnal. Akbar Muhammad. *Tinjauan Kriminologi Terhadap Mucikari Anak Di Bawah Umur Di Kota Palu*. Universitas Tadulako. Kota Palu. Sulawesi Tengah

<sup>4</sup> ECPAT, *Declaration and Agenda for Action : 1st World Congress against Commercial Sexual Exploitation of Children*, Stockholm, Sweden, 27-31 August 1996

<sup>5</sup> Yanuar Farida Wismayanti. *Perdagangan Anak Perempuan Yang Dilacurkan ;Potret Suram Kemiskinan Versus Perlindungan Anak*. [http://www.smeru.or.id/csp/Paper,%20Abstact,%20CV/0102\\_YanuarFarida-paper.pdf](http://www.smeru.or.id/csp/Paper,%20Abstact,%20CV/0102_YanuarFarida-paper.pdf) diakses tanggal 3 November 2016

pelanggaran mendasar terhadap hak-hak anak. Pelanggaran tersebut berupa kekerasan seksual oleh orang dewasa dengan pemberian imbalan kepada anak, atau orang ketiga, atau orang-orang lainnya. Sederhananya, anak diperlakukan sebagai objek seksual dan komersial. Ini adalah perwujudan dari kerja paksa dan perbudakan modern terhadap anak. Hal ini karena tidak jarang anak-anak yang dipaksa mengalami kekerasan fisik dan trauma.<sup>6</sup>

Praktik perdagangan anak yang paling dominan berada di sektor jasa prostitusi.<sup>7</sup> Terutama prostitusi secara online dalam hal ini anak rentan menjadi korban orang-orang yang tidak bertanggung jawab diperkerjakan untuk melayani hasrat pria hidung belang demi mendapatkan keuntungan sebagai mata pencaharian semata. Mereka sering dijadikan objek kepuasan dan kebiadaban individu yang dapat merenggut hak mereka. Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang pertanggungjawaban pidana tindak pidana eksploitasi seksual komersial anak (ESKA), namun dalam penelitian ini penulis hanya membatasinya pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 kemudian mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan apa yang telah diuraikan tersebut maka penulis memfokuskan pada pembahasan tentang: 1) Bagaimana pengaturan mengenai kejahatan prostitusi online dalam perspektif hukum pidana?, 2) Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku anak yang bertindak sebagai mucikari prostitusi online?, dan 3) Bagaimana upaya pembaharuan hukum

---

<sup>6</sup> Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak. 2008. *Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Indonesia*. Restu Printing Indonesia. Medan. hal 6

<sup>7</sup> Chairul Bariah Mozasa. 2005. *Aturan-Aturan Hukum Trafficking*. USU Pers. Medan. Hal. 2

pidana dalam rangka memaksimalkan sanksi pidana menjerat pelaku anak yang bertindak sebagai mucikari prostitusi online?

### **Konsep/Pengertian Pertanggungjawaban Pidana**

Perbuatan lahiriah dalam hukum pidana dikenal sebagai *actus reus*, sedangkan kondisi jiwa dari diri pelaku perbuatan tersebut disebut *mens rea*. Bahwa suatu perbuatan dianggap telah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana, harus dipenuhi dua unsur, yaitu adanya unsur *actus reus* (*physical element*) dan unsur *mens rea* (*mental element*). Unsur *actus reus* adalah esensi dari kejahatan itu sendiri atau perbuatan yang dilakukan, sedangkan unsur *mens rea* adalah sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan.<sup>8</sup> Dalam hal ini delik disebut sebagai unsur subyektif apabila unsur-unsurnya terbukti maka berarti terbuktinya pertanggungjawaban pelaku. Pertanggungjawaban atau liability diartikan sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dan seseorang yang dirugikan.<sup>9</sup> Dalam teori hukum pidana dikenal hal mengenai beberapa konsep yaitu Tindak pidana, pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) dan pemidanaan. Pada prinsipnya pertanggungjawaban pidana didasarkan pada asas kesalahan (*asas culpabilitas*), yang dalam hal ini secara tegas menyatakan bahwasannya tiada pidana dijatuhkan tanpa adanya kesalahan.

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang

---

<sup>8</sup> Abidin A.Zainal Farid. 1995. *Hukum Pidana I*. Sinar Grafika. Jakarta. hal 35

<sup>9</sup> Romli Atmasasmitha. 1989. *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*. LBHI. Jakarta. hal. 79



terjadi atau tidak.<sup>10</sup> Pertanggungjawaban pidana merupakan keadaan yang ada pada diri pembuat ketika melakukan suatu tindak pidana. pertanggungjawaban pidana tersebut diartikan sebagai hubungan antara keadaan pelaku dengan perbuatan dan sanksi yang dijatuhkan sebagaimana seharusnya. Konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan kepadanya.<sup>11</sup>

Van Hammel menyatakan bahwa pertanggungjawaban yaitu suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa 3 (tiga) macam kemampuan untuk:<sup>12</sup>

1. Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri.
2. Memahami bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat.
3. Menetapkan kemampuan terhadap perbuatan-perbuatan itu sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban (*teorekensvatbaarhee*) mengandung pengertian kemampuan atau kecakapan.

---

<sup>10</sup> Saefudien. 2001. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti. Bandung. hal 6

<sup>11</sup> Barda Nawawi Arief. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. hal. 23

<sup>12</sup> Andi Hamzah. 1985. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Ghalia Indonesia. Jakarta. hal. 108

## Syarat adanya Pertanggungjawaban Pidana

Syarat atau prinsip utama untuk adanya pertanggungjawaban pidana dalam hal ini adalah harus adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan. Roeslan Saleh mengatakan bahwa, tidaklah mungkin dapat dipikirkan tentang adanya kesengajaan ataupun kealpaan, apabila orang itu tidak mampu bertanggungjawab. Begitu pula tidak dapat dipikirkan mengenai alasan pemaaf, apabila orang tidak mampu bertanggung jawab dan tidak pula ada kesengajaan atau kealpaan.<sup>13</sup> Secara teoritis bentuk kesalahan berupa kesengajaan dibedakan menjadi tiga corak, yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan dengan sadar kepastian, dan kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*).<sup>14</sup> Pertanggungjawaban pidana diperlukan syarat bahwa pelaku mampu bertanggungjawab. Mengenai kemampuan seseorang untuk bertanggungjawab, menurut KUHP diatur dalam Pasal 44 KUHP.

Moeljatno menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi di samping itu harus ada kesalahan, atau sikap batin yang dapat dicela, ternyata pula dalam asas hukum yang tidak tertulis tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*green straf zonder schuld, ohne schuld keine strafe*).<sup>15</sup> Disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat yaitu:<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> Hamzah Hattrick. 1995. *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability)*. Rajawali Pers. Jakarta. hal 12

<sup>14</sup> Moeljatno. 1985. *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*. Bina Aksara. Jakarta. hal. 174-175

<sup>15</sup> Moeljatno. 1983. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta. hal 37

<sup>16</sup> Moeljatno. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*. Bumi Aksara. Jakarta. hal 153

1. Kemampuan bertanggung jawab atau dapat dipertanggung jawabkan dari pembuat
2. Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya, yaitu disengaja dan sikap kurang hati-hati atau lalai
3. Tidak ada alasan pembeda atau alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat

### **Konsep terhadap Pelaku**

Pelaku tindak pidana menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana dimaksudkan unsur-unsur tersebut dirumuskan dalam undang-undang menurut KUHP. Seperti yang terdapat dalam Pasal 55 (1) KUHP yang berbunyi:

- (1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
  1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
  2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

### **Pelaku dan Kualifikasinya**

Berdasarkan Pasal 55 KUHP, yang merupakan pelaku dalam suatu tindak pidana dapat dibagi kedalam beberapa kualifikasi antara lain:

#### **a) Orang yang melakukan tindak pidana (*dader plagen*)**

Orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana, antara lain :

1. perbuatannya adalah perbuatan yang menentukan terwujudnya tindak pidana.
2. perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana.

b) Orang yang menyuruh melakukan tindak pidana (*doen plagen*)

Dalam tindak pidana ini perlu paling sedikit dua orang, yakni orang yang menyuruh melakukan dan yang menyuruh melakukan, jadi bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.

c) Orang yang turut melakukan tindak pidana (*mede plagen*)

Turut melakukan artinya disini ialah melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yaitu yang melakukan (*dader plagen*) dan orang yang turut melakukan (*mede plagen*).

d) Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*uit lokken*)

Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat, memakai paksaan atau orang yang dengan sengaja membujuk orang yang melakukan perbuatan. Orang yang dimaksud tersebut harus dengan sengaja menghasut orang lain, sedang hasutannya memakai cara-cara dengan memberi upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat dan lain-lain sebagainya.

Syarat-syarat *uit lokken* :

- a. harus adanya seseorang yang mempunyai kehendak untuk melakukan tindak pidana
- b. harus ada orang lain yang digerakkan untuk melakukan tindak pidana
- c. cara menggerakkan harus menggunakan salah satu daya upaya tersebut didalam pasal 55(1) sub 2e (pemberian, perjanjian, ancaman, dan lain sebagainya)

d. orang yang digerakan harus benar-benar melakkan tindak pidana sesuai dengan keinginan orang yang menggerakan

Ditinjau dari sudut pertanggung jawabannya maka pasal 55(1) KUHP tersebut di atas kesemua mereka adalah sebagai penanggung jawab penuh, yang artinya mereka semua diancam dengan hukuman maksimum pidana pokok dari tindak pidana yang dilakukan.

### **Konsep tentang Mucikari**

Mucikari merupakan profesi dalam masyarakat yang diatur di dalam KUHP dan sangat bertentangan dengan kesusilaan, disebutkan istilah mucikari yang tergolong sebagai kejahatan kesusilaan yang diatur dalam BAB XIV Buku II KUHP. Namun istilah pengertian tersebut perlu diartikan secara jelas dan dapat diterima mengapa istilah mucikari termasuk kejahatan kesusilaan. Pengertian mucikari adalah seorang lakilaki atau wanita yang hidupnya seolah-olah dibiayai oleh pelacur, yang dalam pelacuran menolong mencarikan langganan-langganan dari hasil mana ia mendapatkan bagiannya dan menarik keuntungan dari pekerjaan yang dilakukan oleh pelacur. Yang dimaksud dengan orang yang menarik keuntungan di sini adalah mucikari tersebut.<sup>17</sup>

Mucikari merupakan orang yang berperan penting sebagai perantara pekerja seks komersial (PSK). Pelaku mucikari tidak hanya sebatas dari kalangan orang dewasa tapi anak-anak dibawah umurpun juga melakoni pekerjaan tersebut. Dikalangan anak-anak yang masih menyandang status sebagai pelajar sangatlah mudah untuk terjadinya prostitusi dan terkadang hal inilah yang membuat para pelajar menjadi korban bahkan sekaligus menjadi pelaku perdagangan orang

---

<sup>17</sup> Dalam skripsi Caswanto. 2016. *Tindak Pidana Prostitusi yang Diusahakan dan Disediakan oleh Hotel di Indramayu dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Pasundan. hal 47-48

dalam seks atau prostitusi. Mucikari bertindak sebagai manager yang mengelola hubungan antara pelacur dan pelanggan.<sup>18</sup>

## **Prostitusi online**

### **Konsep/Pengertian Prostitusi**

Prostitusi secara etimologis berasal dari kata *prostitution* yang berarti hal menempatkan, dihadapkan, hal menawarkan.<sup>19</sup> Sedangkan kata “*prostitute*” merujuk pada kata keterangan yang berarti WTS atau sundal dikenal pula dengan istilah Wanita Tuna Susila (WTS). Prostitusi diartikan sebagai bentuk dari penyimpangan seksual, dengan pola-pola organisasi impuls/dorongan seks yang tidak wajar dan tidak terintegrasi dalam bentuk pelampiasan nafsu-nafsu seks tanpa kendali dengan banyak orang, disertai eksploitasi dan komersialisasi seks yang impersonal tanpa afeksi sifatnya. Prostitusi dianggap sebagai pilihan yang mudah dalam mencari nafkah karena bagi masyarakat prostitusi merupakan alternatif mata pencaharian.

Iwan Bloch juga berpendapat bahwa, prostitusi adalah suatu bentuk perhubungan kelamin di luar pernikahan dengan pola tertentu, yakni kepada siapa pun secara terbuka dan hampir selalu dengan pembayaran baik untuk persebadanan, maupun kegiatan seks lainnya yang memberikan kepuasan yang diinginkan oleh yang bersangkutan.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Reno Bachtiar dan Edy Purnomo. 2007. *Bisnis Prostitusi, Profesi yang Menguntungkan*. Pinus Book Publisher. Yogyakarta. hal 35

<sup>19</sup> Butje Tampi. 2010. “*Kejahatan Kesusilaan dan Pelecehan Seksual Dalam Hukum Pidana Indonesia*”. Karya Ilmiah Universitas Sam Ratulangi Fakultas Hukum. Manado. hal 56

<sup>20</sup> Soerjono D. 1997. *Pelacuran Ditinjau Dari Segi Hukum Dan Kenyataan Dalam Masyarakat*. PT. Karya Nusantara. Bandung. hal 17



## **Prostitusi dalam Peraturan Perundang-Undangan**

Tindak pidana yang terkait dengan prostitusi termuat dalam Pasal 296 KUHP yang mengancam dengan hukuman penjara kepada siapa saja yang pekerjaannya atau kebiasaannya dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang ketiga.<sup>21</sup> Kemudian Pasal 506 KUHP yang mengatur pidana terhadap mucikari yang mengambil keuntungan dari tindakan prostitusi.<sup>22</sup> Selain dari pasal-pasal tersebut, terdapat pula beberapa pasal lainnya dalam KUHP yang berkaitan dengan prostitusi, yaitu Pasal 297 yang mengatur tentang perdagangan perempuan dan anak laki-laki untuk dijadikan pekerja seks; dan Pasal 295 yang mengatur ketentuan yang mirip dengan Pasal 296 namun berbeda pada obyeknya, yang mana pada Pasal 295 ini ditujukan kepada anak yang belum dewasa.<sup>23</sup> Terdapat ketentuan lain yang dalam hal ini bertentangan dengan praktek prostitusi antara lain Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Perdagangan orang menurut ketentuan Undang-undang tersebut adalah merupakan tindakan-tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang lain tersebut, baik yang dilakukan dalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan tereksplorasi.

---

<sup>21</sup> Soedjono D. 1997. *Pelacuran Ditinjau Dari Segi Hukum Dan Kenyataan Dalam Masyarakat*. Karya Nusantara. Bandung. hal 60

<sup>22</sup> *Ibid.* hal 110

<sup>23</sup> *Ibid.* hal 61-62

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo* Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yaitu manakala melibatkan anak. Berkaitan dengan anak ini dalam pasal 287 KUHP terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa 'barang siapa yang bersetubuh dengan seorang wanita di luar pernikahan, padahal diketahuinya atau sepetutnya harus diduga bahwa umurnya lima belas tahun, atau kalau tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun. Namun dengan keluarnya antara lain Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo* Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007, maka batas umur dalam pasal 287 KrtduHP harus ditafsir dengan didasarkan pada undang-undang yang baru, yaitu di bawah umur delapan belas tahun, dimana penafsiran semacam ini masuk dalam kategori penafsiran sistematik.

### **Konsep/Pengertian Prostitusi Online**

Prostitusi online sebagai kejahatan cyber crime merupakan kejahatan jual beli perdagangan manusia dalam kegiatan kasus tawar menawar yang bersendikan pada pelayanan penikmat jasa yang pelancaran nya bersendikat pada dunia maya atau jejaring internet sebagai media penyambung dalam meluruskan aksi kejahatan tersebut.<sup>24</sup> Kata terakhir dari istilah prostitusi online menggambarkan tempat dimana aktivitas ini dilakukan. Online adalah istilah yang digunakan orang untuk menyatakan sesuatu yang berhubungan dengan internet atau dunia maya. Dengan demikian prostitusi online merupakan kegiatan prostitusi atau suatu kegiatan yang menjadikan seseorang sebagai objek untuk diperdagangkan melalui media elektronik atau online. Prostitusi online ini dapat didefinisikan secara garis

---

<sup>24</sup> Rudiansyah. 2015. *Prostitusi Online Sebagai Cyber Crime*. <http://www.wordpress.com>. diakses pada tanggal 10 juli 2018

besar adalah praktek prostitusi atau pelacuran dengan menggunakan media internet atau online sebagai sarana transaksi bagi mereka Perempuan Seks Komersil (PSK) dan yang ingin menggunakan jasanya. Jadi internet hanya sebagai sarana penunjang atau penghubung saja. Tidak seperti pada umumnya transaksi PSK yang menunggu pelanggannya dipinggir-pinggir jalan. Pada praktik prostitusi online ini mucikari menjadikan orang sebagai objek untuk diperdagangkan melalui perantara media online.

### **Pengaturan Prostitusi Online dalam Peraturan Perundang-Undangan**

Pengaturan mengenai prostitusi Online dalam peraturan perundang undangan yang ada diatur dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 *jo* Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), terdapat Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi, yaitu pada Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dalam Pasal ini siapa saja yang memenuhi unsur tindak pidana melakukan eksploitasi seksual dapat dipidana sesuai ketentuan pidana yang berlaku dalam Undang-undang ini.

Tujuan di pembentukan Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sebagai wujud “Pembaharuan Hukum” sebagai pengaruh dari 7 (tujuh) Aspek Pembaharu Hukum, yaitu Aspek Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yang sebagaimana diketahui delapan aspek pembaharuan hukum antara lain; Aspek Globalisasi, Aspek Politik, Aspek Ekonomi, Aspek Pendidikan, Aspek Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Aspek Supremasi Hukum, dan Aspek Perspektif Hukum Islam. Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dibentuk dalam upaya mengimbangi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang

teknologi informasi dan transaksi elektronik, agar tidak terjadi kekosongan hukum jika terjadi tindakan perbuatan melawan hukum.<sup>25</sup>

Pertimbangan lain berkaitan dengan dibentuknya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 *jo* Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 adalah semakin maraknya prostitusi melalui jaringan Facebook. Bahkan anak-anak remaja semakin banyak yang terjatuh dalam kasus prostitusi melalui situs online internet. Prostitusi melalui internet kini menjadi trend bisnis.

Dengan semakin beredarnya gambar-Gambar porno di internet dan pemerintah pada tahun 2008 telah mengundangkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 *jo* Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang tertuang dalam Pasal 27 ayat 1 yang berbunyi: setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Mengenai hal tersebut diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 45 yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

### **Anak yang Berhadapan dengan Hukum**

#### **Konsep/Pengertian Anak**

Konsep mengenai Anak didefinisikan dan dipahami berbeda sesuai dengan sudut pandang dan kepentingan yang beragam mengingatkan pentingnya

---

<sup>25</sup> Ermansiah Djaja. 2010. *Penyelesaian Sengketa Hukum Teknologi Informasi dan transaksi Elektrik (Kajian Yuridis Penyelesaian Secara Non Ligitasi Melalui Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa)*. Pustaka Timur. Yogyakarta. hal 9

posisi anak dalam perkembangan kemajuan bangsa ini.<sup>26</sup> Anak memiliki karakteristik khusus (spesifik) dibandingkan dengan orang dewasa dan merupakan salah satu kelompok rentan yang haknya masih terabaikan, oleh karena itu hak - hak anak menjadi penting diprioritaskan.<sup>27</sup> Pengertian ini bersandar pada kemampuan anak, jika anak telah mencapai umur 18 tahun, namun belum mampu menghidupi dirinya sendiri, maka termasuk katagori anak. Dalam perkembangan hukum positif di Indonesia anak didefinisikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/person under age*), orang yang dibawah umur/keadaan dibawah umur (*minderjarig heid/inferiority*) atau biasa disebut juga sebagai anak yang berada dibawah pengawasan wali (*minderjarige under voordij*).

#### **Pengaturan tentang kriteria Sebagai Anak**

Mengacu pada konvensi PBB tentang Hak Anak (Convention on the right of te child), maka definisi anak : "Anak berarti manusia di bawah umur 18 tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan di capai lebih awal". Di Indonesia mengenai batasan kriteria usia anak tersebut dapat dilakukan penelusuran terhadap beberapa peraturan perundang-undangan, Adapun beberapa peraturan perundang-undangan saat ini adalah sebagai berikut:

- a) Pasal 1 Convention on the Right of the Child, Anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 (delapan belas) tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya. Artinya yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang belum dewasa dan yang menjadi

---

<sup>26</sup> M.Nasir Djamil. *Anak Bukan Untuk Dihukum.Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Anak (UU-SPA)*. (Jakarta:Sinar Grafika. 2013) hal 8

<sup>27</sup> PERMEN Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I. Nomor 15 Tahun 2010, Pedoman Umum Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I.

dewasa karena peraturan tertentu sedangkan secara mental dan fisik masih belum dewasa.

- b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, mensyaratkan usia perkawinan 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki
- c) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
- d) Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Pengertian anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
- e) Dalam lapangan Hukum Tata Negara, hak memilih dalam Pemilihan umum (Pemilu), yaitu seseorang yang telah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun.
- f) Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Ketentuan ini diambil dari Convention on the Right of the Child, yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Keppres R.I Nomor 36 Tahun 1990 dengan sedikit perubahan didalamnya.
- g) Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.



- h) Pasal 1 angka 8 huruf a Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, menyebutkan anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai usia 18 (delapan belas) tahun. Artinya yang dimaksud anak adalah seseorang sampai dengan usia 18 (delapan belas) tahun.
- i) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam Pasal 1 angka 3 menyebutkan Anak yang berkonflik dengan hukum, yang selanjutnya disebut anak adalah orang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun yang disangka, didakwa atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana.
- j) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan membolehkan usia bekerja 15 tahun
- k) Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 ayat (1) dikatakan bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah usia 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan
- l) Pasal 45 KUHP, orang yang belum cukup umur, yaitu mereka yang melakukan perbuatan (tindak pidana) sebelum umur 16 (enam belas) tahun
- m) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, memberlakukan wajib belajar 9 Tahun, yang dikonotasikan menjadi anak berusia 7 sampai 15 Tahun.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> M.Nasir Djamil. *Op.Cit.* hal 10

Melihat hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa penetapan batasan umur atau usia anak digantungkan pada kepentingan pada saat produk hukum tersebut dibuat.

### **Anak yang Bermasalah dengan Hukum**

Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Undang-Undang tersebut yang dimaksud dengan anak dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor. 11

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan sebagai berikut:

1. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, anak menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
2. Anak berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
3. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut sebagai anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
4. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Masalah anak merupakan arus balik yang tidak diperhitungkan dari proses dan perkembangan pembangunan bangsa-bangsa yang mempunyai cita tinggi dan masa depan cemerlang guna menyongsong dan menggantikan pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia. Terkait dengan hal itu paradigma pembangunan haruslah pro anak.<sup>29</sup> Harry E. Allen and Clifford E. Simmons menjelaskan

---

<sup>29</sup> Muhammad Joni dan Zulchaina Z Tanamas. 1999. *Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. hal 83

bahwa terdapat 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat anak harus berhadapan dengan hukum, yaitu:<sup>30</sup>

1. *Status Offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah, atau kabur dari rumah;
2. *Juvenile Delinquence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

Tingkah laku menjurus kepada masalah *Juvenile Delinquency* itu menurut Alder, adalah:<sup>31</sup>

1. Kebut-kebutan di jalan yang mengganggu keamanan lalu lintas dan membahayakan jiwa sendiri dan orang lain;
2. Perilaku ugal-ugalan, berandal, urakan yang mengacaukan ketentraman lingkungan sekitarnya. Tingkah ini bersumber pada kelebihan energi dan dorongan primitif yang tidak terkendali serta kesukaan menteror lingkungan;
3. Perkelahian antar geng, antar kelompok, antar sekolah, antar suku (tawuran) sehingga kadang-kadang membawa korban jiwa.
4. Membolos sekolah bergelandangan sepanjang jalan atau bersembunyi di tempat-tempat terpencil sambil melakukan eksperimen bermacam-macam kedurjanaan dan tindakan asusila;
5. Kriminalitas anak, remaja, dan Adolesens antara lain perbuatan mengancam, intimidasi, memeras, mencuri, mencopet, merampas, menjambret, menyerang, merampok, mengganggu, menggarong, melakukan pembunuhan dengan

---

<sup>30</sup> Harry E. Allen and Clifford E. Simmons dalam Purniati, Mamik, Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk. 2003. *Correction in America An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*. UNICEF. Jakarta. hal 2

<sup>31</sup> Nashriana. 2011. *Perlindungan Hukum Pidana Anak*. RajaGrafindo Persada. Jakarta hal 31-33

menyembelih korbannya, mencekik, meracun, tindak kekerasan dan pelanggaran lainnya;

6. Berpesta pora sambil mabuk-mabukan, melakukan hubungan seks bebas, atau orgi (mabuk yang menimbulkan kacau balau) yang mengganggu sekitarnya.
7. Perkosaan, agresivitas seksual, dan pembunuhan dengan motif sosial, atau didorong oleh reaksi-reaksi kompensatoris dari perasaan inferior, menuntut pengakuan diri depresi, rasa kesunyian, emosi, balas dendam, kekecewaan, ditolak cintanya oleh seorang wanita dan lain-lain;
8. Kecanduan dan ketagihan Narkoba (obat bius, drug, opium, ganja) yang erat kaitannya dengan kejahatan;
9. Tindakan-tindakan immoral seksual secara terang-terangan tanpa tedeng aling-aling, tanpa malu dengan cara kasar. Ada seks dan cinta bebas tanpa kendali (*promiscuity*) yang didorong oleh hiperseksualitas.

Kenakalan anak sering disebut dengan *Juvenile delinquency* yang diartikan dengan anak cacat social. Kartini Kartono menegaskan bahwa Delinquency itu mempunyai konotasi serangan, pelanggaran, kejahatan, dan keganasan yang dilakukan oleh anak-anak muda dibawah usia 22 tahun.<sup>32</sup> Menurut Sudarsono, Suatu perbuatan dikatakan delinkien apabila perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan norma yang ada dalam masyarakat dimana ia hidup atau suatu perbuatan yang anti social yang didalamnya terkandung unsur-unsur anti normative.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Kartini Kartono. 1992. (a). *Patologi Sosial (2), Kenakalan Remaja*. Rajawali Pers. Jakarta. hal 7

<sup>33</sup> Sudarsono. 1991. *Kenakalan Remaja*. Rineka Cipta. Jakarta. hal 10

## Metode Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, jenis penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif. Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji Undang-Undang. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan atau (*statute approach*), pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>34</sup> Sehingga di dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan Undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 kemudian mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pendekatan Konsep (*conseptual approach*), merujuk pada prinsip ini dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum, mengenai pertanggung jawaban pidana (*Criminal responsibility*) terhadap pelaku karena ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya jadi ada unsur subjektif. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana/perbuatan yang dilakukan oleh seseorang.

## Sumber Data Hukum

- 1) Data hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat, yang berkaitan dengan tema

---

<sup>34</sup> Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, SH., MS., LL. M. 2010. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. hal 93

yang diangkat “Pertanggungjawaban pidana pelaku anak yang bertindak sebagai mucikari prostitusi online”, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 kemudian mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- 2) Bahan hukum sekunder merupakan suatu bahan yang menjadi penunjang sebagai penjelasan dari bahan primer. Bahan sekunder ini merupakan kumpulan pustaka misalnya adalah literatur hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kepustakaan, dokumentasi. Teknik kepustakaan antara lain dengan cara mempelajari buku-buku, jurnal, surat kabar, situs internet dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berbagai sumber pustaka yang lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Mencari data tentang teori-teori pendapat para ahli atau doktrin-doktrin para sarjana, berkaitan dengan pokok penelitian mengenai Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku anak yang bertindak sebagai pelaku mucikari prostitusi online.

#### **Hasil dan pembahasan**

##### **Kejahatan Prostitusi Online dalam Perspektif Hukum Pidana**

Ditinjau dari sudut pandang hukum saat ini, prostitusi dipandang sebagai perbuatan yang bisa dikatakan bertentangan dengan kaidah hukum pidana.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Soedjono D. 1997. *Pelacuran Ditinjau Dari Segi Hukum Dan Kenyataan Dalam Masyarakat*. Karya Nusantara. Bandung. hal. 7



Terlebih prostitusi dengan memanfaatkan media elektronik atau online. Menggunakan perangkat elektronik sebagai medianya seperti smartphone berbasis internet yang sekarang ini dipakai oleh hampir semua kalangan di masyarakat untuk mempermudah dalam berinteraksi. seperti facebook, line, blackberry messenger, instagram, dan whatsapp yang akhir-akhir ini sering disalahgunakan oleh pelaku mucikari prostitusi online (*uit lokken*) yang dengan sengaja membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana.

Pengaturan mengenai prostitusi online dalam peraturan perundang-undangan tidak hanya terdapat dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 *jo* Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik akan tetapi terdapat beberapa peraturan perundang-undangan di luar yang juga mengaturnya.

Kejahatan berbasis prostitusi ini diatur dalam Buku II KUHP Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan dan Buku III KUHP Bab II tentang pelanggaran ketertiban umum. Dijelaskan pada Pasal 296 Buku II KUHP tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan, yang berbunyi::

“Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pekerjaan atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah”.

Pasal 506 Buku III KUH Pidana tentang Pelanggaran Ketertiban Umum, yang berbunyi:

“Barang siapa mengambil keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun”.

Prostitusi baik dilakukan secara online, maupun secara konvensional dalam hal ini tidaklah jauh berbeda, perbedaannya hanya terletak pada penggunaan internet

sebagai sarana untuk untuk menjalankan praktiknya. Belum terdapat Peraturan yang secara spesifik mengenai prostitusi online, namun dalam pengaplikasiannya untuk menjerat pelaku mucikari prostitusi online bisa menggunakan Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP (delik umum), dan dapat ditambahkan pemberatan dengan penggunaan Undang-undang lainnya.

Undang-undang Tahun 2002 *jo* Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengandung beberapa ketentuan khusus tentang eksploitasi seksual, seperti Pada Pasal 76I yang berbunyi:

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak

Ketentuan pidana terdapat pada Pasal 88 yang berbunyi:

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

Dijelaskan pula dalam Pasal 15 pada huruf F dan Pasal 59 ayat (1) dan (2),

Pasal 15 berbunyi:

“Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:  
F. kejahatan seksual”.

Pasal 59 ayat (1) dan (2) berbunyi:

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.
- (2) Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
  - d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
  - f. Anak yang menjadi korban pornografi;
  - h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
  - j. Anak korban kejahatan seksual;
  - n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang

Namun dalam hal ini Undang-undang perlindungan anak tidak mengatur ketentuan-ketentuan khusus yang mendefinisikan dan seharusnya mengkriminalisasi mengenai kejahatan seksual anak. Dalam Undang-undang perlindungan anak perlindungan hukum bagi anak dilakukan secara represif diselenggarakan ketika anak telah menjadi korban, atau menjadi pelaku kejahatan seksual.

Diatur hal yang serupa pada Pasal 1 ayat (8) dan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi diatur dalam Pasal 30 *jo* Pasal 4.

Terdapat kebijakan mengenai hukum teknologi informasi (*law of information technology*) dengan adanya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 *jo* Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dalam hal ini berkaitan dengan (*cyber space*) atau mayantara dunia maya dan dianggap dapat memberikan keamanan dan kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi. Penanggulangan kejahatan di dunia maya tidak terlepas dari kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa dikenal dengan istilah “politik kriminal”. Sudarto pernah mengemukakan tiga arti mengenai kebijakan criminal (*politik kriminal*), yaitu:<sup>36</sup>

Dalam arti sempit politik kriminal itu digambarkan sebagai keseluruhan asas dan metode, yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Dalam arti lebih luas ialah merupakan keseluruhan fungsidi aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi. Sedang dalam arti paling luas ialah merupakan keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-

---

<sup>36</sup> Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. hal 113

ndangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Dengan penafsiran sistematis terhadap KUHP (sebagai ketentuan umum), dapat diketahui bahwa ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik melarang aktivitas prostitusi yang dilakukan dengan media elektronik.<sup>37</sup>

BAB VII terdapat pada Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 *jo* Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, terkait perbuatan dilarang tertuang bahwasannya: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. Mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Perbuatan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya sebuah informasi dan / atau dokumen yang bersifat elektronik.
2. Informasi dan / atau dokumen elektronik tersebut mengandung unsur pelanggaran terhadap kesusilaan.
3. Dilakukan dengan sengaja dan sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah sebuah perbuatan yang melanggar hukum.

Ruang cyber secara yuridis sudah tidak pada tempatnya lagi untuk mengategorikan sesuatu dengan ukuran dan kualifikasi konvensional untuk dapat dijadikan objek dan perbuatan, sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu

---

<sup>37</sup> Dewi Bunga. 2012. *Prostitusi Cyber Dikursus Penegakan Hukum Dalam Anatomi Kejahatan Tddransnasional*. Udayana University Press. Denpasar. hal 12

banyak kesulitan dan hal-hal yang lolos dari jerat hukum.<sup>38</sup> Kegiatan cyber adalah kegiatan virtual, tetapi berdampak sangat nyata meskipun alat elektronik, dengan subjek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai telah melakukan perbuatan hukum secara nyata. Dunia hukum sebenarnya sudah sejak lama memperluas penafsiran asas dan normanya ketika menghadapi persoalan benda tak berwujud ini.<sup>39</sup>

Merujuk pada ketentuan pidana pada Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 jo Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan / atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal tersebut hanya dapat menjerat orang yang “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya sebuah informasi dan/atau dokumen yang bersifat elektronik yang memuat pelanggaran kesusilaan”. Dalam kasus prostitusi online adalah mucikari yang bertindak melakukan aksinya dengan menggunakan sosial media untuk mendatangkan atau melakukan kegiatan yang mengandung kesusilaan.

### **Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Anak yang Bertindak Sebagai Mucikari Prostitusi Online**

Pertanggungjawaban adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya. Untuk adanya

---

<sup>38</sup> Suharianto Budi. 2013. *Tindak Pidana Teknologi Informasi*. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta. hal 103

<sup>39</sup> *Ibid.* hal 104

pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, ini berarti harus dipastikan terlebih dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana.<sup>40</sup> Pertanggungjawaban pidana dalam hal ini dimaksudkan guna menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa tindak pidana dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya atau tidak.<sup>41</sup> Pertanggungjawaban pidana mengarah pada pemidanaan pelaku, jika melakukan tindak pidana dan telah memenuhi unsur-unsurnya dalam Undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya, maka seseorang akan dipertanggungjawabkan pidana apabila tindakan tersebut melawan hukum.

Pertanggungjawaban pidana terhadap seorang anak dibawah umur, sebagai subjek pelaku yang melakukan tindak pidana, bahwa anak tersebut dapat bertanggungjawab secara pidana dengan adanya suatu proses tersendiri yang tidaklasama dengan memproses orang dewasa. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab, maka hanya seseorang mampu bertanggungjawab yang akan dipertanggungjawabkan. Hubungan pelaku dengan tindakannya serta akibat yang ditimbulkan ditentukan oleh kemampuannya bertanggungjawab. Pelaku dapat mengetahui ketercelaan dari tindakannya dan dapat menentukan apakah tindakannya itu akan dilakukannya atau tidak. Dapat dikatakan bahwa untuk menentukan adanya kemampuan bertanggungjawab itu ada dua faktor, yaitu

---

<sup>40</sup> Roeslan Saleh. 1999. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Aksara Baru. Jakarta. hal. 80

<sup>41</sup> E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. 1982. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Alumni AHM-PTM. Jakarta. hal 250

faktor akal dan faktor kehendak. Akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan perbuatan yang tidak dibolehkan.<sup>42</sup>

Pelaku anak yang bertindak sebagai mucikari dalam prostitusi online dikatakan melakukan aktivitasnya dengan akal yang sehat dan bisa untuk membedakan mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak. Mengenai kehendak yang ada pada pelaku anak (Mucikari) dalam prostitusi online ini dapat dilihat dari alasan ekonomi yang secara umum merupakan alasan mereka mau terjun untuk menjalankan bisnis prostitusi.

Pemidanan terhadap pelaku tindak pidana merupakan suatu proses dinamis yang meliputi penilaian secara terus menerus dan seksama terhadap sasaran-sasaran yang hendak dicapai dan konsekuensi-konsekwensi yang dapat dipilih dari keputusan tertentu terhadap hal-hal tertentu pada suatu saat.<sup>43</sup> Penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari penegakan hukum khususnya penegakan hukum pidana. Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 *jo* Undang-undang nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadikan payung hukum dari upaya memberantas prostitusi online yang semakin marak terjadi akhir-akhir ini, ketika anak telah menjadi korban, atau menjadi pelaku kejahatan seksual.

Pelaku dalam hal ini mucikari dapat dibebani pertanggungjawaban apabila terpenuhi unsur objektif dan subjektifnya:

- Unsur Objektif

---

<sup>42</sup> Arya Mahardhika Pradana. Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-44 No.2 April-Juni 2015. *Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Prostitusi dan Pertanggungjawaban Pidana Para Pihak yang Terlibat dalam Prostitusi*. Universitas Indonesia. hal 23

<sup>43</sup> Setiady, T. 2010. *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Alfabeta. Bandung. hal 64.

Apabila pelaku telah melakukan dan telah tercapainya tujuan dari prostitusi online:

- 1) Tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya
- 2) Sebuah informasi dan/atau dokumen yang bersifat elektronik
- 3) Informasi dan/atau dokumen yang bersifat elektronik mengandung unsur pelanggaran kesusilaan

- Unsur subjektifnya

Berkenaan dengan rumusan tentang kesalahan yang melekat pada muatan KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-undang nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dirumuskan kesalahan dari perbuatan menjalankan kegiatan prostitusi secara online hanya dirumuskan :

- 1) Dengan adanya kesalahan
- 2) Perbuatan itu dilakukan dengan sengaja, sadar akan adanya aturan yang melarangnya
- 3) Keadaan jiwa yang sehatSetelah terpenuhinya unsur-unsur tersebut pelaku dalam hal ini mucikari dapat sanksi berupa pidana penjara paling lama 6 tahun dan pidana denda Sebesar Rp.1.000.000.000,00 ,(satu miliar).

Tentunya penanganan masalah anak yang berhadapan dengan hUkum berbeda dengan orang dewasa, maka secara khusus terdapat ketentuan yang mengatur masalah ketika anak ditempatkan sebagai pelaku kejahatan dan terlebih anak dalam hal ini bertindak sebagai pelaku mucikari yang menjalankan prostitusi



secara online, Terdapat Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pemidanaan atau penjara sebagai upaya yang paling akhir terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga anak yang berhadapan dengan hukum diperlakukan prinsip Restorative Justice System.

Seorang pelaku tindak pidana anak dijatuhkan sanksi, yaitu tindakan, bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun (Pasal 69 ayat (2) UU SPPA) dan Pidana, bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas. Menelaah juga dalam penjelasan pada Pasal 81 ayat (2) dimana hukuman atau pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak dibawah umur yang sudah melakukan kejahatan adalah paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Dan dalam Pasal 81 ayat (6) disebutkan bahwa “Jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Sanksi Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi (Pasal 82 Undang-undang Nomor. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan pidana Anak):

- Pengembalian kepada orang tua/Wali;
- Penyerahan kepada seseorang;
- Perawatan di rumah sakit jiwa;
- Perawatan di LPKS;
- Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- Perbaikan akibat tindak pidana.

Sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana anak, Pidana Pokok dan Pidana Tambahan (Undang-undang Nomor. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan pidana Anak)

Pidana Pokok terdiri atas:

- Pidana peringatan;
- Pidana dengan syarat, yang terdiri atas: pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan;
- Pelatihan kerja;
- Pembinaan dalam lembaga;
- Penjara.

Pidana Tambahan terdiri dari:

- Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
- Pemenuhan kewajiban adat.

Permasalahan hukum terjadi tidak hanya menimpa orang dewasa. Anak juga tidak luput berbenturan dengan persoalan hukum. Perlindungan hukum tidak hanya diberikan kepada anak yang menjadi korban dalam suatu masalah hukum, tapi juga kepada anak-anak yang menjadi pelakunya. Perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo* Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Penjatuhan pidana atau tindakan merupakan suatu tindakan yang harus di pertanggungjawabkan dan dapat bermanfaat bagi anak. Setiap melaksanakan pidana atau tindakan, diusahakan tidak menimbulkan korban, penderitaan, kerugian mental, fisik, dan sosial. Mencegah akibat-akibat yang tidak diinginkan yang sifatnya merugikan, perlu diperhatikan dasar etis bagi pemidanaan tersebut, yaitu keadilan sebagai satu-satunya dasar pemidanaan, setiap tindakan pemidanaan dinilai tidak hanya berdasarkan sifat keadilan saja, melainkan juga sifat kerukunan yang akan dicapainya, karena dalam kerukunan tercermin pula keadilan, pemidanaan merupakan tindakan terhadap anak nakal yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, penilaian anak nakal, tidak selalu

didasarkan pada kualitas kemampuan rohaniyah dan psikis pada waktu kenakalan dilakukan, tetapi terutama didasarkan pada kemampuan mereka berhak untuk menerima pidana dan tindakan.<sup>44</sup>

### **Upaya Pembaharuan Hukum Pidana dalam Rangka Memaksimalkan Sanksi Pidana Menjerat Pelaku Anak yang Bertindak Sebagai Pelaku Mucikari Prostitusi Online**

Pertanggungjawaban pidana dalam hal ini harus didasari pada kebijakan-kebijakan formulasi suatu tindak pidana. Untuk menentukan dan merekonstruksikan subyek yang bertanggungjawab dalam terjadinya tindak pidana prostitusi online. Maka harus ditelaah dasar hukum atau sistem hukum yang menjadi pijakan untuk menentukannya. Berkaitan dengan batasan definisi tentang pertanggungjawaban pidana, konsep KUHP Baru memberikan batasan-batasan tentang pertanggungjawaban pidana secara eksplisit dalam rumusan pasal. Hal ini berbeda dengan KUHP yang sekarang berlaku tidak memberikan rumusan secara tegas tentang yang yang dimaksudkan dengan pertanggungjawaban pidana.<sup>45</sup>

Dalam KUHP yang sekarang Buku II KUHP Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan dan Buku III KUHP Bab II tentang pelanggaran ketertiban umum. Dijelaskan pada Pasal 296 Buku II KUHP tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan yang berbunyi:

Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama

---

<sup>44</sup> Maidin Gultom. 2008. *Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Refika Aditama. Cetakan I. Bandung. hal 124

<sup>45</sup> Tongat. SH., M.Hum. 2009. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif pembaharuan*. UMM Press. Malang. hal 299

satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.

Terdapat unsur-unsur tindak pidana yang di atur dalam pasal 296 KHUP tersebut antara lain;

- 1) Barang siapa
- 2) Dengan sengaja
- 3) Menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain
- 4) Dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau kebiasaan.

Pada unsur-unsur ke 3) Menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, maka hal ini dikatakan sebagai perbuatan memudahkan dilakukannya suatu tindakan melanggar kesusilaan.

Pasal 506 Buku III KUHP tentang Pelanggaran Ketertiban Umum yang berbunyi;

Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikanya sebagai pencaharian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.

Rumusan tindak pidana yang di atur dalam pasal 289 KHUP ini memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Barang siapa
- 2) menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita
- 3) dan menjadikanya sebagai pencaharian

Unsurke 2) “menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita” memiliki arti bahwa seseorang dalam hal ini bisa disebut mucikari yang menarik keuntungan bisnis prostitusi tersebut.

Namun tidak satupun pasal dalam KUHP yang mengatur mengenai prostitusi online, yang ada hanya pengaturan tentang orang yang menyediakan

tempat serta memuluskan cara agar terlaksananya kegiatan prostitusi dan mengambil keuntungan dari perbuatan tersebut. Hukum pidana yang diberlakukan saat ini hanya mengkategorikan prostitusi sebagai suatu delik terhadap pihak perantaranya. Dengan keadaan yang berkembang pada saat ini terutama dalam hal teknologi, menimbulkan kesulitan-kesulitan dalam penerapan KUHP terhadap persoalan prostitusi online, karena KUHP yang sekarang dirancang tidak untuk mengantisipasi munculnya penyalahgunaan teknologi seperti yang terjadi saat ini.

Dalam perkembangannya terdapat upaya dalam pembaharuan hukum pidana yang dapat mengatur tentang prostitusi online dengan adanya RKUHP yang mempunyai sifat eksplisit atau mempertegas dalam rumusan pasalnya. Pertanggungjawaban pidana yang didasarkan kesalahan terutama dibatasi pada perbuatan yang dilakukan dengan sengaja (*dolus*). Dapat pidana delik culpa hanya bersifat perkecualian apabila ditentukan oleh Undang-undang. Jika pertanggungjawaban terhadap akibat tertentu dari tindak pidana yang oleh Undang-undang diperberat ancaman pidananya, hanya dikenakan kepada pelaku apabila sepatu sudah dapat menduga kemungkinan terjadinya akibat itu atau apabila terdapat kealpaan. Jadi RKUHP tidak menganut doktrin menanggung akibat secara murni, tetapi tetap diorientasikan pada asas kesalahan. Hal ini terlihat dalam Pasal 40 RKUHP yang berbunyi:

- 1) Seseorang hanya dapat dipertanggungjawabkan jika orang tersebut melakukan tindak pidana dengan sengaja atau karena kealpaan.
- 2) Perbuatan yang dapat dipidana adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan secara tegas bahwa suatu tindak pidana yang dilakukan dengan kealpaan dapat dipidana.
- 3) Seseorang hanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap akibat tindak pidana tertentu yang oleh Undang-undang diperberat ancaman pidananya, jika ia mengetahui kemungkinan terjadinya akibat tersebut atau sekurang-kurangnya ada kealpaan.

Dalam hal ada kesesatan, *error facti* maupun *error iuris*, RKUHP berprinsip pelaku tidak dapat dipertanggungjawabkan dan oleh karena itu tidak dapat dipidana. Namun demikian, apabila kesesatan itu patut dipersalahkan kepadanya, maka pelaku dapat dipidana. Pendirian konsep KUHP yang demikian dirumuskan dalam Pasal 43 ayat (1) RKUHP yang berbunyi:

“Tidak dipidana, jika seseorang tidak mengetahui atau sesat mengenai keadaan yang merupakan unsur tindak pidana atau berkeyakinan bahwa perbuatannya tidak merupakan suatu tindak pidana, kecuali ketidaktahuan, kesesatan, atau keyakinannya itu patut dipersalahkan kepadanya.”

Secara normatif maka dalam hal ini setiap pelaku anak yang melakukan tindak pidana dan perbuatannya bertindak sebagai mucikari prostitusi online tersebut patut dipersalahkan dan bisa dibuktikan maka sudah dapat dipastikan pelaku anak tersebut dihukum atau dikenakan pidana. Sesuai dengan Pasal 470 RKUHP 2015 tentang tindak pidana prostitusi ini dirumuskan:

Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V

Prostitusi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 470 RKUHP ini dapat digunakan untuk menjangkau kejahatan cyber berbasis prostitusi online, karena dalam Pasal ini dirumuskan bahwa materi-materi yang berkaitan dengan aktivitas prostitusi tersebut disiarkan atau disebarkan melalui media sosial, media elektronik dan/atau alat komunikasi media. RKUHP dalam hal ini juga merumuskan yurisdiksi teritorial guna untuk menjangkau kejahatan dunia cyber, termasuk halnya prostitusi yang diatur dalam Pasal 4 RKUHP yang berbunyi:

Ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan:

1. tindak pidana di wilayah Negara Republik Indonesia;
2. tindak pidana dalam kapal atau pesawat udara Indonesia; atau
3. tindak pidana di bidang teknologi informasi yang akibatnya dirasakan atau terjadi di wilayah Indonesia atau dalam kapal atau pesawat udara Indonesia.

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana. Moeljatno mengatakan “orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana.”<sup>46</sup> Dalam konteks perundangan juga dikatakan bahwa ada tidaknya pidana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang ada, yang diinterpretasikan bahwa tiada pertanggung jawaban pidana tanpa aturan hukum yang mengaturnya terlebih dahulu.<sup>47</sup>

### **Kesimpulan**

Pengaturan mengenai prostitusi online dalam peraturan perundang-undangan tidak hanya terdapat dalam :

- 1) Pasal 27 ayat 1 *jo* 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 *jo* Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 2) Kejahatan berbasis prostitusi secara umum diatur dalam Buku II KUHP Bab XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Buku III KUHP Bab II tentang Pelanggaran Ketertiban Umum. Dijelaskan pada Pasal 296 Buku II KUHP tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Pasal 506 Buku III KUH Pidana tentang Pelanggaran Ketertiban Umum.

---

<sup>46</sup> Moeljatno 1987. *Asas-asas Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta. hal 155

<sup>47</sup> Chairul Huda. 2011. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Kencana Prenedia Media Group, Jakarta. hal 20-21

- 3) Undang-undang Tahun 2002 jo Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengandung beberapa ketentuan khusus tentang eksploitasi seksual, seperti Pada Pasal 76I, Pasal 88, Dijelaskan pula dalam Pasal 15 pada huruf F dan Pasal 59 ayat (1) dan (2).
- 4) Diatur hal serupa dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pada Pasal 1 ayat (8) dan Pasal 2 ayat (1) dan (2).
- 5) Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi diatur dalam Pasal 30 jo Pasal 4.

Pembaharuan Hukum Pidana dalam Rangka Memaksimalkan Sanksi Pidana Menjerat Pelaku Anak yang Bertindak Sebagai Mucikari Prostitusi Online yang Melibatkan Anak didasarkan pada perumusan dapat dilihat dalam terlihat dalam Pasal 40, Pasal 43, Pasal 470 RKUHP

#### **Saran**

Sebaiknya dilakukan pengkajian dan pembahasan lebih mendalam lagi mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku, baik anak sebagai korban maupun sebagai pelaku. sehingga peraturan perundang-undangan dalam hukum pidana dapat lebih menjangkau kejahatan cyber berbasis prostitusi online.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin A.Zainal Farid. Hukum Pidana I. Sinar Grafika. Jakarta. 1995
- Andi Hamzah. Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1985;
- Arya Mahardhika Pradana. Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-44 No.2 April-Juni 2015. Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Prostitusi dan Pertanggungjawaban Pidana Para Pihak yang Terlibat dalam Prostitusi. Universitas Indonesia
- Barda Nawawi Arief. Pornografi, Pornoaksi dan Cybersex- Cyberporn. Pustaka Magister. Semarang. 2011;
- Barda Nawawi Arief. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2001;
- Butje Tampi. “Kejahatan Kesusilaan dan Pelecehan Seksual Dalam Hukum Pidana Indonesia”. Karya Ilmiah Universitas Sam Ratulangi Fakultas Hukum. Manado. 2010;
- Chairul Huda. Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan. Kencana Prenedia Media Group. Jakarta. 2011;
- Chairul Bariah Mozasa. Aturan-Aturan Hukum Trafficking. USU Pers. Medan. 2005;
- Dewi Bunga. Prostitusi Cyber Dikursus Penegakan Hukum Dalam Anatomi Kejahatan Tddransnasional. Udayana University Press. Denpasar. 2012;

Dalam skripsi Caswanto. Tindak Pidana Prostitusi yang Diusahakan dan  
 Disediakan oleh Hotel di Indramayu dalam Perspektif Hukum Pidana  
 Indonesia. Fakultas Hukum Universitas Pasundan. 2016;

ECPAT, Declaration and Agenda for Action : 1st World Congress against  
 Commercial Sexual Exploitation of Children, Stockholm, Sweden, 27-31  
 August 1996

Ermansiah Djaja. Penyelesaian Sengketa Hukum Teknologi Informasi dan  
 transaksi Elektrik (Kajian Yuridis Penyelesaian Secara Non Ligitasi  
 Melalui Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa). Pustaka Timur.  
 Yogyakarta. 2010;

E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan  
 Penerapannya. Alumni AHM-PTHM. Jakarta. 1982;

Hamzah Hattrick. Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana  
 Indonesia ( Strict Liability dan Vicarious Liability). Rajawali Pers. Jakarta.  
 1995;

Harry E. Allen and Clifford E. Simmons dalam Purniati, Mamik, Sri Supatmi,  
 dan Ni Made Martini Tinduk. Correction in America An Introduction,  
 Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System)  
 di Indonesia. UNICEF. Jakarta. 2003;

Jurnal. Akbar Muhammad. Tinjauan Kriminologi Terhadap Mucikari Anak Di  
 Bawah Umur Di Kota Palu. Universitas Tadulako. Kota Palu. Sulawesi  
 Tengah

Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak. 2008.

Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Indonesia. Restu Printing Indonesia. Medan. 2008;

Kartini Kartono. (a). Patologi Sosial (2), Kenakalan Remaja. Rajawali Pers. Jakarta. 1992

Moeljatno. Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia. Bina Aksara. Jakarta. 1985;

Muhammad Joni dan Zulchaina Z Tanamas.. Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. 1999

Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Rineka Cipta. Jakarta. 1983;

Moeljatno. Asas-asas Hukum Pidana. Bina Aksara. Jakarta. 1987;

Moeljatno. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana. Bumi Aksara. Jakarta. 1983;

M.Nasir Djamil. Anak Bukan Untuk Dihukum.Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Anak (UU-SPA). Jakarta:Sinar Grafika. 2013;

Maidin Gultom. Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Refika Aditama. Cetakan I. Bandung. 2008;

Nurudin. Pengantar KomunikasiMassa. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2014;

Nashriana. Perlindungan Hukum Pidana Anak. RajaGrafindo Persada. Jakarta 2011;

PERMEN Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I. Nomor 15 Tahun 2010, Pedoman Umum Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I.

Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, SH., MS., LL. M. Penelitian Hukum. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. 2010;

Romli Atmasasmita. Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana. LBHI. Jakarta. 1989.

Reno Bachtiar dan Edy Purnomo. Bisnis Prostitusi, Profesi yang Menguntungkan. Pinus Book Publisher. Yogyakarta. 2007;

Rudiansyah.. Prostitusi Online Sebagai Cyber Crime. <http://www.wordpress.com>. 2015;

Saefudien. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2001;

Soerjono D. Pelacuran Ditinjau Dari Segi Hukum Dan Kenyataan Dalam Masyarakat. PT. Karya Nusantara. Bandung. 1997;

Sudarsono. Kenakalan Remaja. Rineka Cipta. Jakarta. 1991;

Soedjono D. Pelacuran Ditinjau Dari Segi Hukum Dan Kenyataan Dalam Masyarakat. Karya Nusantara. Bandung. 1997;

Sudarto. Kapita Selekta Hukum Pidana. Alumni. Bandung. 1986;

Suharianto Budi. Tindak Pidana Teknologi Informasi. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta. 2013

Setiady, T. Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia. Alfabeta. Bandung. 2010;

Sudarto. Hukum dan Hukum pidana. Alumni. Bandung. 1981;

Sudarto. Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat. Sinar Baru. Bandung. 1983;

Tongat. SH., M.Hum. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif pembaharuan. UMM Press. Malang. 2009;

Yanuar Farida Wismayanti. Perdagangan Anak Perempuan Yang Dilacurkan  
;Potret Suram Kemiskinan Versus Perlindungan Anak.  
[http://www.smeru.or.id/csp/Paper,%20Abstact,%20CV/0102\\_YanuarFari](http://www.smeru.or.id/csp/Paper,%20Abstact,%20CV/0102_YanuarFari)  
da-paper.pdf diakses tanggal 3 November 2016

